

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR PRIMA SEJAHTERA  
TAHUN 2022**



**Ruko Sutera Niaga I No. 30, Kota Tangerang Selatan, Banten  
TELEPON: 02153128835**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

BPR Prima Sejahtera menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan untuk dapat menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR antara lain untuk

1. Mendukung visi dan misi BPR.
2. Memberikan manfaat dan nilai tambah bagi para pemegang saham.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah dan stakeholder.

Penerapan Tata Kelola (GCG) merupakan tata cara pengaturan yang dilakukan dalam memimpin atau mengatur bisnis perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham.

Referensi peraturan dalam penyusunan Laporan Tata Kelola PT.BPR Prima Sejahtera yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal BPR.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS.
7. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
8. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Laporan Pelaksanaan GCG ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ada



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Erry Hermawan
	NIK	:	3674041805780011
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan prudential banking practices serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS</p> <p>2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank.</p> <p>3. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Fungsi Audit Intern</li><li>2) Fungsi Manajemen Risiko</li><li>3) Fungsi Kepatuhan</li></ul> <p>4. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.</p> <p>5. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem recruitment, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai.</p> <p>6. Menjalankan prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi.</p> <p>7. Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari service dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip prudential banking practices.</p> <p>8. Merumuskan strategi bisnis, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko.</p> <p>9. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain</p>			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
<p>1. Menyetujui Rencana Bisnis Bank Tahunan tahun 2022</p> <p>2. Dewan Komisaris memastikan telah terlaksananya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.</p> <p>3. Pemanfaatan Anggaran pelatihan 2022 yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit Kerja yang ada.</p>			



4. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara rutin dan memberikan masukan kepada Direksi untuk pengembangan bisnis.
5. Melakukan pemetaan pasar sehingga bisa lebih fokus pada pengembangan pasar perkreditan.
6. Melakukan evaluasi kredit lebih teliti dan memperkuat proses pengajuan kredit sampai dengan checking dan appraisal dengan benar.
7. Fokus pada pembinaan kredit dan penanganan kredit bermasalah dan menekan jumlah NPL.
8. Monitoring seluruh kegiatan operasional secara berkesinambungan sehingga pelaksanaan kegiatan operasional lebih maksimal.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Thony Wijaya
	NIK	:	3173051501800002
	Jabatan	:	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</li><li>3. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.</li><li>2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.</li><li>3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li></ol></li><li>4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK, Akuntan Publik dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li><li>5. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.</li><li>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</li></ol></li><li>6. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.</li><li>7. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada OJK.</li><li>8. Menyetujui/mereview setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.</li></ol>			



	9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pengawasan secara optimal.	
2.	Nama	: Ronny Abdikesuma
	NIK	: 5271032812640001
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</li><li>3. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.</li><li>2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.</li><li>3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li></ol></li><li>4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK, Akuntan Publik dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li><li>5. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.</li><li>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</li></ol></li><li>6. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.</li><li>7. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada OJK.</li><li>8. Menyetujui/mereview setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.</li><li>9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pengawasan secara optimal.</li></ol>	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyetujui Rencana Bisnis Bank Tahunan tahun 2022.</li><li>2. Dewan Komisaris memastikan telah terlaksananya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.</li><li>3. Pemanfaatan Anggaran pelatihan 2022 yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit Kerja yang ada.</li><li>4. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara rutin dan memberikan masukan kepada Direksi untuk pengembangan bisnis.</li><li>5. Melakukan pemetaan pasar sehingga bisa lebih fokus pada pengembangan pasar perkreditan.</li><li>6. Melakukan evaluasi kredit lebih teliti dan memperkuat proses pengajuan kredit sampai dengan checking dan appraisal dengan benar.</li><li>7. Fokus pada pembinaan kredit dan penanganan kredit bermasalah dan menekan jumlah</li></ol>	



NPL. 8. Monitoring seluruh kegiatan operasional secara berkesinambungan sehingga pelaksanaan kegiatan operasional lebih maksimal
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
nihil	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	nihil	

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		



	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
<b>3.</b>	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
nihil			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Erry Hermawan	3674041805780011	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil.				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Erry Hermawan	3674041805780011	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
nihil.					



### C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

#### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Erry Hermawan	367404180578 0011	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
nihil.					

#### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Erry Hermawan	367404180578 0011	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
nihil.					

### D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Thony Wijaya	3173051501800002	Rp4.050.000.000,00	45%
2.	Ronny Abdikesuma	5271032812640001	Rp900.000.000,00	10%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
komisaris utama kepemilikan saham sebesar 45 persen dan komisaris kepemilikan saham sebesar 10 persen				



## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Thony Wijaya	3173051501800002	601909	PT. BPR Prima Nadi	40%
2.	Ronny Abdikesuma	5271032812640001	601909	PT. BPR Prima Nadi	10%
3.	Thony Wijaya	3173051501800002	601062	PT. BPR Prima Dewata	45%
4.	Ronny Abdikesuma	5271032812640001	601062	PT. BPR Prima Dewata	10%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kepemilikan Saham Komisaris Utama pada Perusahaan lain yaitu pada PT. BPR Prima Nadi memiliki 40 persentase saham dan di PT. BPR Prima Dewata memiliki 45 persentase saham dan untuk Komisaris kepemilikan saham di PT. BPR Prima Nadi dan PT. BPR Prima Dewata masing masing sebesar 10 persen saham.					

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Thony Wijaya	3173051501800002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ronny Abdikesuma	5271032812640001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Thony Wijaya	3173051501800002	Tidak ada	Tidak ada	Yasin Wijaya - Kakak Kandung
2.	Ronny Abdikesuma	5271032812640001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Hubungan Keluarga Komisaris Utama dengan Pemegang Saham yaitu Saudara Yasin Wijaya adalah Kakak Kandung

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	Rp177.707.134,00	2	Rp182.414.096,00
2.	Tunjangan	1	Rp54.303.564,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	1	Rp11.900.000,00	2	Rp10.784.292,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp243.910.698,00		Rp193.198.388,00

Penjelasan Lebih Lanjut :

data total Direksi dalam 1 tahun mendapatkan Rp. 243.910.698 dan Dewan Komisaris mendapatkan Rp. 193.198.388



## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	mobil (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
fasilitas kendaraan bermotor untuk operasional adalah 2 mobil			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.62 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.94 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.09 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
perbandingan gaji dari anggota direksi dewan komisaris dan seluruh karyawan tahun 2022	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	22 Februari 2022	3	Perkembangan Laporan Kinerja Keuangan BPR Prima Sejahtera Posisi Bulan Januari 2022
2.	14 Maret 2022	4	Perkembangan Laporan Kinerja Keuangan BPR Prima Sejahtera Posisi Bulan Februari 2022
3.	17 Mei 2022	4	Perkembangan Laporan Kinerja Keuangan BPR Prima Sejahtera Posisi Bulan April 2022



4.	23 Mei 2022	3	Evaluasi Kinerja BPR Prima Sejahtera dan Pembahasan NPL Bulan April 2022
5.	08 Juni 2022	4	Perkembangan Laporan Kinerja Keuangan BPR Prima Sejahtera Posisi Bulan Mei 2022
6.	20 September 2022	3	Perkembangan Laporan Kinerja Keuangan BPR Prima Sejahtera Posisi Bulan Agustus 2022
7.	08 November 2022	4	Perkembangan Laporan Kinerja Keuangan BPR Prima Sejahtera Posisi Bulan Oktober 2022
8.	19 Desember 2022	4	Perkembangan Laporan Kinerja Keuangan BPR Prima Sejahtera Posisi Bulan November 2022
9.	19 Desember 2022	4	Pembahasan RBB tahun 2023 PT BPR Prima Sejahtera
10.	01 April 2022	2	Pembahasan tentang Evaluasi Kinerja BPR Prima Sejahtera bulan Maret 2022
11.	12 Juli 2022	2	Pembahasan tentang Evaluasi Kinerja BPR Prima Sejahtera bulan Juni 2022
12.	10 Agustus 2022	2	Pembahasan tentang Evaluasi Kinerja BPR Prima Sejahtera bulan Juli 2022
13.	10 Oktober 2022	2	Pembahasan tentang Evaluasi Kinerja BPR Prima Sejahtera bulan Agustus 2022
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
membahas tentang evaluasi kinerja BPR Prima Sejahtera selama tahun 2022 dan RBB tahun 2023			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Thony Wijaya	3173051501800002	6	5	84.615384 61538461%
2.	Ronny Abdikesuma	5271032812640001	6	7	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
komisaris utama hadir 6 kali fisik dan 5 telekonfrensi selama 1 tahun dan komisaris hadir 6 kali fisik dan 7 telekonfrensi selama 1 tahun					



## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
nihil								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
nihil		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									




Penjelasan Lebih Lanjut :
nihil

**L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
nihil					

Tangerang Selatan, 19 Januari 2023

**PT BPR Prima Sejahtera**

  
**Erry Hermawan**  
Direktur



  
**Thony Wijaya**  
Komisaris Utama



## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Prima Sejahtera
Alamat	: Ruko Sutera Niaga I No. 30, Kota Tangerang Selatan, Banten
Nomor Telepon	: 02153128835
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp4.800.996.441,00
Total Aset	: Rp25.667.253.017,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Prima Sejahtera Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.68	0.336
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.44	0.216
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.90	0.190
6	Penerapan Fungsi Audit intern	2.20	0.220
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.50	0.038
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.12	0.212
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.10	0.158
10	Rencana Bisnis BPR	1.54	0.116
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.60	0.120
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik



## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.68)

Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank secara profesional dengan mengedepankan prudential banking practices serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.44)

Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0) Nihil.

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2) Nihil.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka melaksanakan prinsip kehati hatian.

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.2)

Membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.5)

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor ekstern atas laporan keuangan PT BPR Prima Sejahtera telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material, neraca, kinerja keuangan dana arus kas yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022 sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia.

### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.12)

Strategi manajemen resiko disusun untuk memastikan bahwa BPR Prima Sejahtera tetap mempertahankan eskposur resiko sesuai dengan kebijakan, prosedur intenal bank, dan peraturan perundang undangan dan ketentuan lain yang beriakku.

### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.1)

Selama tahun 2022 BPR telah menjalankan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit.



10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.54)

BPR telah menyusun rencana bisnis yang sesuai dengan visi misi perusahaan dan sudah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.6)

BPR telah menyampaikan kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan kepada stakeholder termasuk laporan keuangan publikasi triwulan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.


C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Prima Sejahtera atas Pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG pada posisi akhir tahun 2022 yang mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan Baik dengan nilai komposit dari akumulasi penilaian 11 faktor adalah sebesar 1.8 dan mendapatkan peringkat komposit 2.

Tangerang Selatan, 24 Januari 2023

PT BPR Prima Sejahtera

  
Erry Hermawan  
Direktur



  
Thony Wijaya  
Komisaris Utama 



## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR Prima Sejahtera Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Prima Sejahtera selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tangerang Selatan, 24 Januari 2023

PT BPR Prima Sejahtera

Erry Hermawan  
Direktur



Thony Wijaya  
Komisaris Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT. BPR Prima Sejahtera

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

506324-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-602706-25012023144958

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bprprima.tangsel@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-25 14:49:58



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



# PT. BPR PRIMA SEJAHTERA

Komplek Ruko Alam Sutera - Sutera Niaga I No. 30  
Jl. Raya Serpong - Kota Tangerang Selatan ( 15325 )  
Telp. ( 021 ) 53128835, 53128836 Fax. ( 021 ) 5398668  
e-mail : bprprima.tangsel@gmail.com

Nomor : 009/BPR-PS/I/2023  
Lampiran : 1 Bundel

Tangerang Selatan, 30 Januari 2023

Kepada Yth.  
**DPP PERBARINDO**  
Komp. Patra No. 46  
Jl. Jendral Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih  
Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola (GCG) Tahun 2022

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/PEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola (Self Assesment) PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Sejahtera posisi akhir tahun 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Sejahtera

Direksi,

**Ery Hermawan**

Direktur

Tembusan :

1. Dewan Komisaris PT. BPR Prima Sejahtera.
2. Arsip.